



KR-Istimewa

Kegiatan Mahasiswa Stikes Guna Bangsa menginisiasi 'Kecubung Ceting' di Kepuharjo.

Stikes Guna Bangsa Luncurkan 'Kecubung Ceting'

SLEMAN (KR) - Turut mendukung percepaan penuruan stunting, mahasiswa Prodi Kebidanan Program Magister Stikes Guna Bangsa Yogyakarta meluncurkan program 'Kepuharjo Peduli Calon Pengantin, Ibu Hamil dan Bayi untuk Mencegah Stunting' yang disingkat 'Kecubung Ceting' di Gedung Serbaguna Huntap Pagerjurang Kepuharjo Cangkringan, belum lama ini.

"Stunting menjadi salah satu masalah kesehatan di Indonesia. Saat ini, Indonesia merupakan peringkat lima kejadian stunting pada balita di dunia," jelas Ketua Prodi Kebidanan Program Magister Stikes Guna Bangsa, Gunarmi dalam keterangannya, Rabu (9/2).

Ditambahkan, dengan masih ditemukannya angka stunting di Desa Kepuharjo menimbulkan keprihatinan. Hal itulah yang kemudian melatarbelakangi mahasiswa untuk menginisiasi program Kecubung Ceting tersebut. **(Feb)**

Kekayaan Intelektual Perlu Dikomersialisasikan

YOGYA (KR) - Sampai saat ini, Universitas Ahmad Dahlan (UAD) telah memiliki 1.302 hak cipta dan 16 hak paten karya mahasiswa dan dosen maupun kolaborasi mahasiswa-dosen. "Meski demikian, hak cipta dan hak paten terus ditingkatkan secara kuantitas dan kualitas. Bahkan Kekayaan Intelektual perlu dikomersialisasikan,"kata Kepala Sentra Kekayaan Intelektual (KI) UAD Dra Sudarmini MPd di Room Meeting Kampus 2 Jalan Pramuka Umbulharjo Yogyakarta, Rabu (9/2). Kegiatan Pelatihan Komersialisasi diselenggarakan Sentra Kekayaan Intelektual bersama Kantor Urusan Bisnis dan Investasi (KUBI) UAD dibuka Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UAD Anton Yudhana MT PhD.

Menurut Sudarmini, hak paten dan hak cipta belum dimanfaatkan secara maksimal. "Sampai saat ini, baru 10 persen hasil dari riset yang memiliki hak paten dan hak cipta dimanfaatkan industri," katanya. **(Jay)**

MASIH DIBAHAS DI PANSELNAS Seleksi PPPK Guru Tahap III Ditunda

JAKARTA (KR) - Penundaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru tahap III saat ini masih dibahas di tingkat Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Sedianya seleksi PPPK Guru tahap III ini digelar Januari 2022.

"Penundaan ini dilakukan untuk mempertimbangkan sejumlah masukan dari masyarakat. Sampai sekarang masih dalam pembahasan Panselnas dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak," ujar Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, dalam temu media secara daring, Selasa (8/2).

Nunuk menegaskan, digelarnya seleksi PPPK guru ini berprinsip memberi kesempatan yang adil

bagi seluruh guru honorer, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Namun dalam praktiknya, ternyata banyak guru pegawai yayasan yang turut seleksi PPPK dan pihaknya tidak bisa melarangnya.

"Prinsipnya kami tidak boleh melanggar hak setiap guru honorer, termasuk guru swasta. Guru swasta jika tingkat kesejahteraannya baik, tentu tidak akan ikut seleksi kompetensi ASN," kata Nunuk.

Kementerian Pendayagunaan

TANDATANGANI KERJA SAMA UWM Yogya-UM Metro Lampung

YOGYA (KR) - Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah (UM) Metro Lampung menandatangani kerja sama selama lima tahun ke depan dalam kegiatan yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi (PT).

"Rektor harus bergerak, keluar kota, keluar negeri untuk membangun jejaring dengan universitas dalam dan luar negeri serta lembaga-lembaga strategis lainnya," tutur Rektor UWM Prof Dr Edy Suandi Hamid MEc usai penandatanganan MoU dengan Rektor UM Metro Drs Jazim Ahmad MPd, Selasa (8/2) di Aula Gedung Hubungan Internasional, Kampus I UM Metro Lampung.

Para pihak juga sepakat menindaklanjuti kesepakatan kerja sama di level fakultas, yang ditandatangani



KR-Istimewa

Penandatanganan MoU antara UWM Yogya Kerjasama UM Metro Lampung.

Dekan Fakultas Hukum UWM Dr Kelik Endro Suyono dan Dekan Fakultas Hukum UM Metro M Sofwan Taufiq SHI MSI. Turut menyaksikan Wakil Rektor III UWM Puji Qomariyah SSos MSI dan para wakil rektor UM Metro.

Penandatanganan kerja sama ini sebagai respons lanjut kunjungan Rektor UM Metro dan jajarannya

ke UWM, Jumat (28/1), yang ditemui Rektor UWM.

"Kerja sama ini sebagai bagian dari pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sesuai Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang MBKM. Peraturan menteri itu membuka peluang antar perguruan tinggi untuk bersinergi," jelas Prof Edy. **(Vin)**

AGAR PEMULIHAN LEBIH MERATA

Ekonomi Tak Hanya Tumbuh, Tapi Harus Berkualitas

JAKARTA (KR) - Pemerintah tidak hanya mendorong ekonomi tetap tumbuh. Namun juga harus berkualitas agar pemulihan lebih merata dan semakin terakselerasi.

"Kita tidak hanya berusaha melakukan pemulihan dari produk domestik bruto (PDB), tapi kita lihat kualitas pertumbuhannya," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Mandiri Investment Forum 2022 di Jakarta, Rabu (9/2).

Menurut Menkeu, pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan penurunan tingkat pengangguran, kemiskinan dan gini ratio

karena tiga aspek ini merupakan indikator utama kualitas pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi harus bisa menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan serta menciptakan pembangunan dan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat. "Jadi, tidak menciptakan kesenjangan yang semakin lebar antara kaya dan miskin," ujarnya.

Sejauh ini, menurut Menkeu,

arah dari kualitas pertumbuhan Indonesia sudah cukup baik yang berarti setiap satu persen pertumbuhan mampu mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan lainnya. "Kita akan terus membuka jalur agar kita terus mencapai pertumbuhan yang lebih baik," tegasnya.

Diungkapkan Menkeu, Indonesia secara kumulatif sepanjang 2021 tumbuh positif mencapai 3,69 persen (yoy) atau lebih baik dibandingkan 2020 yang mengalami kontraksi 2,07 persen. Tingkat kemiskinan di Indonesia juga terus mengalami penurunan dari awalnya pada Maret 2015 sebesar

11,22 persen menjadi 9,22 persen pada September 2019.

Di sisi lain, tren penurunan ini terhenti pada 2020 seiring Covid-19 mulai memasuki Indonesia yakni menjadi 9,78 persen pada Maret 2020. Namun mulai kembali membaik ke level 9,71 persen pada September 2021. Sementara itu, dari sebanyak 140,15 juta orang angkatan kerja per Agustus 2021 terdapat 9,1 juta orang pengangguran atau 6,49 persen. Angka tersebut sudah turun 0,67 juta orang dari Agustus 2020 yang sebanyak 9,77 juta orang atau 7,07 persen dari total angkatan kerja. **(Lmg)**

PLN Percepat Transisi Energi

JAKARTA (KR) - PT PLN (Persero) terus berupaya mempercepat transisi energi dan mengurangi emisi karbon yang menjadi salah satu agenda penting dalam pertemuan G20 di Indonesia melalui pengoperasian 648 megawatt pembangkit energi bersih pada tahun ini. Pengoperasian pembangkit energi bersih juga bertujuan mendukung pemerintah mencapai target net zero emission pada 2060.

"Tahun ini kami menargetkan penambahan kapasitas terpasang pembangkit energi baru terbarukan mencapai 648 megawatt yang terdiri dari pembangkit tenaga surya, air, panas bumi, angin hingga sampah," kata Direktur Perencanaan Korporat PLN Evy Haryadi dalam rilisnya, Rabu (9/2).

Menurutnya, pada tahun ini PLN akan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga panas bumi sebesar 108 megawatt dan tambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas 53 megawatt. Selanjutnya, juga akan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga minihidro sebesar 154 megawatt dan pembangkit listrik tenaga surya sebesar 287 megawatt. Sedangkan untuk pembangkit listrik tenaga angin kapasitasnya mencapai 2 megawatt dan pembangkit listrik tenaga sampah sebesar 43 megawatt.

"Regional Jawa, Madura, dan Bali mendominasi bauran pembangkit listrik bersih dengan total kapasitas terpasang saat ini mencapai 9,6 gigawatt. Sedangkan wilayah Sumatera sudah mempunyai kapasitas terpasang pembangkit energi bersih sebesar 5,2 gigawatt," jelas Evy.

Ditambahkan, sesuai rencana mempersiapkan pembangkit listrik tenaga uap pada 2026, PLN akan menggantikan pembangunan listrik fosil itu dengan pembangkit energi bersih baseload yang dapat menghasilkan listrik secara terus-menerus. Secara bertahap mulai 2026, PLN akan menambah kapasitas pembangkit energi bersih baseload sebesar 100 megawatt. Pada 2027, pembangkit energi bersih akan bertambah menjadi 265 megawatt dan 2028 kemudian bertambah lagi 215 megawatt. **(Has)**

EKONOMI



Menjaga Ketahanan Energi

BEBERAPA waktu lalu, tepatnya awal Januari 2022, pemerintah Indonesia berencana menghentikan ekspor batubara. Alasannya memang logis, demi memenuhi kebutuhan pasokan energi dalam negeri. Sebab, banyak kalangan yang memprediksi Indonesia akan kekurangan cadangan energi dalam beberapa tahun mendatang. Jika bisa menghemat, atau setidaknya tidak menjualnya kepala dunia luar, kita bisa menghemat cadangan energi dan menyimpannya untuk kelangsungan hidup anak cucu.

Faktanya memang untuk kehidupan saat ini, rasanya kita tidak bisa hidup tanpa energi. Semua yang berkaitan dengan kehidupan kita saat ini membutuhkan energi, baik dalam bentuk minyak, gas, batubara dan lain sebagainya. Maka, jika energi ini habis atau tiba-tiba hilang, kehidupan manusia modern juga ikut serta hilang.

Proyeksi ke depannya, krisis energi ini akan terus berlanjut. Jika kita tidak mampu mengelola ketahanan energi ini dengan baik, bisa kacau. Di tengah krisis energi yang melanda dunia, permintaan bahan bakar terus mengalami kenaikan mulai dari gas alam, batu bara, minyak bumi sampai pada minyak sawit mentah atau CPO. Kenaikan sejumlah bahan mentah energi memang berimbas pada kenaikan berbagai komoditas turunannya. Sebab, dari sisi produksi seperti pabrik misalnya, pabrik apapun itu, untuk mengoperasikannya, semua membutuhkan energi. Jika harga energi mahal, maka produk turunannya juga akan ikut mahal.

Maka dari itu, penting bagi kita untuk bisa menjaga ketahanan energi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Pertama, kita perlu memperbanyak kilang minyak sebagai penyimpan energi. Sebab, kemampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan energi lokal masih sangat rendah. Pada tahun 2013, tempat penyimpanan energi hanya mampu menyediakan pasokan untuk 48 hari saja. Pada tahun 2025 diproyeksikan turun menjadi 28 hari. Dan ini akan terus semakin berkurang seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi. Maka dari itu, kita perlu membangun lebih banyak lagi kilang penyedot cadangan energi.

Kedua, rasanya kita juga perlu mulai beralih ke penggunaan energi yang berkelanjutan. Sebab kita sadar bahwa penggunaan energi bahan bakar fosil suatu saat akan habis. Jika kita mengeksplorasi terus menerus, suatu saat nanti, pasti akan habis. Maka dari itu, kita harus mulai memikirkan alternatifnya yang berkelanjutan dan lebih ramah lingkungan.

Ketiga, kita perlu untuk menghemat energi. Langkah pemerintah menghentikan ekspor batubara sudah tepat, meski kemudian banyak diprotes oleh beberapa negara. Sebab memang kita perlu untuk menghemat energi dan menyimpannya untuk memenuhi kebutuhan energi lokal. Selain itu, secara pribadi, harus mulai menghemat dalam penggunaan energi, baik listrik, minyak dan juga gas. Tidak perlu memakai energi secara berlebihan, bahkan kalau bisa, jangan menggunakan energi kalau tidak terlalu membutuhkan.

Sebenarnya masih banyak lagi beberapa hal yang kiranya bisa kita lakukan untuk menjaga ketahanan energi. Namun dalam tulisan sederhana ini, penulis hanya menyebutkan beberapa saja. Kita perlu berkomitmen secara bersama-sama untuk menjaga ketahanan energi, mulai dari diri kita sendiri, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan lain sebagainya. Jika semua unsur secara bersama-sama bisa berkomitmen, maka masalah ancaman krisis energi akan bisa kita selesaikan. Semoga! **(Misbahul Munir, Alumni Magister Ilmu Ekonomi UII, Sekjen Kaukus Aliansi Kebangsaan dan Staf Pengajar di STAI Ash-Shiddiqiyah OKI)**